

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah disusun. Rumusan strategi menunjukkan hasil yang akan dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, strategi dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan dan program pembangunan operasional sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan digunakan sebagai pedoman dalam usaha pelaksanaan program dan kegiatan, yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi serta target yang telah ditetapkan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga dijadikan acuan dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tujuan mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih seperti tertuang dalam tabel berikut ini :



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi : Mengembangkan keunggulan komparatif sebagai daya tarik investasi										
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis integrasi keunggulan agribisnis daya saing agribisnis dan pariwisata.	Meningkatnya iklim investasi dan daya saing bisnis daerah	Peningkatan daya saing daerah	Meningkatkan pelayanan perijinan investasi, pengembangan infrastruktur, penyesuaian penataan ruang, penataan regulasi	√	√	√	√	√	√



